

PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PERALIHAN PROGRAM NASIONAL JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL / BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI DESA KERANJI PAIDANG KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Oleh:
ARMANSYAH
NIM. E11110022

Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

e-mail: armansyah142naif@yahoo.co.id

Abstrak

Sejak diberlakukannya program Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sjsn) mulai Januari 2014 maka program Jamkesmas beralih ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Perubahan ini akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penulisan Artikel ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap Peralihan Program Nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat Ke Jaminan Kesehatan Nasional / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan fenomena apa adanya yang terjadi pada masyarakat, peneliti mendeskripsikan persepsi masyarakat. Teori yang digunakan untuk membantu peneliti menganalisis adalah teori persepsi oleh Walgito. Hasil penelitian ini menggambarkan upaya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan, bentuk persepsi masyarakat terhadap peralihan program nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan di desa Keranji Paidang, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) bagi masyarakat, dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peralihan program nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan.

Kata-kata kunci : Persepsi Masyarakat, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Pemahaman Masyarakat.

**PERCEPTION AMONG THE POOR PEOPLE OF THE SHIFT FROM NATIONAL
HEALTHCARE PROGRAM TO NATIONAL HEALTHCARE/SOCIAL
SECURITY AGENCY IN KERANJI PAIDANG VILLAGE
SUBDISTRICT OF SENGAH TEMILA
LANDAK REGENCY**

Abstract

Since the implementation of the National Social Security System (Sjsn) program beginning January 2014, the Jamkesmas program was switched into the National Healthcare program (Jkn) organized by Health and Social Security Agency (Bpjs) as referred to in paragraph (1): a. The Ministry of Health no longer holds a Community Healthcare program (Jamkesmas). The shift will provide a significant change to health services for the community.

This article aims to provide an overview of the Perception among the poor people of the shift from National Healthcare Program to National Healthcare/Social Security Agency in Keranji Paidang Village, Subdistrict of Sengah Temila, Landak Regency. This research was a qualitative descriptive study. The researcher intended to describe and explain the phenomenon of what is happening in society by describing people's perception. The theory used to help the researcher to analyze is the theory of perception by Walgito. Research findings showed the efforts made by the village government in providing services to the community regarding the Community Healthcare program (Jamkesmas) to the National Healthcare program (Jkn) / Health and Social Security Agency (Bpjs), people's perception of the shift from the Community Healthcare program (Jamkesmas) of the National Healthcare Program (Jkn) / Health and Social Security Agency (Bpjs) in Keranji Paidang Village, the level of knowledge and understanding of the function and benefits of the National Healthcare program (Jkn) for the community, as well as supporting factors and obstacles in the implementation of the shift from the Community Healthcare program (Jamkesmas) to the National Healthcare program (Jkn) / Health and Social Security Agency (Bpjs).

Keywords: People's Perception, Community Healthcare, National Healthcare Program / Health and Social Security Agency (Bpjs), and People's Understanding.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan untuk penduduk miskin dan tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Program jaminan untuk penduduk miskin sudah dimulai dengan nama PJKMM (Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) kemudian diubah menjadi Askeskin (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin) dan kemudian diubah lagi menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) dan pengelolaannya berpindah dari PT Askes ke Kementerian Kesehatan.

Sejak diberlakukannya program Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sjsn) mulai Januari 2014 maka program Jamkesmas beralih ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) tersebut selanjutnya dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan sebagai program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Hadi Setia Tunggal, SH (2015 :77-78).

Pengalihan program ini meliputi 6 hal. pelaksanaan koordinasi dan simulasi dalam proses pengalihan program Jamkesmas ke dalam BPJS Kesehatan, pelaksanaan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional, penyelesaian pembayaran terhadap klaim fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas, pendayagunaan verifikator independen Jamkesmas menjadi sumber daya manusia yang diperlukan BPJS Kesehatan sesuai kualifikasi, pemanfaatan teknologi aplikasi verifikasi klaim dan sistem pelaporan pelaksanaan Jamkesmas ke dalam BPJS Kesehatan dan, pengalihan data kepesertaan Penerima Jamkesmas tahun 2013 ke dalam BPJS Kesehatan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran.

Pengalihan program jamkesmas ke Jkn / Bpjs ini untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, sebagaimana tujuan pembangunan kesehatan, Pemerintah Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2014 telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyatnya secara bertahap hingga 1 Januari 2019. Jaminan kesehatan ini merupakan pola pembiayaan yang bersifat wajib, artinya pada tanggal 1 Januari 2019

seluruh masyarakat Indonesia (tanpa terkecuali) harus telah menjadi peserta melalui pengalihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) ini adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Pelayanan kesehatan di Desa Keranji Paidang untuk masyarakat miskin yang menggunakan Jamkesmas dilakukan di Puskesmas Kecamatan, yaitu Puskesmas Pahauman yang jarak tempuhnya \pm 6 Km dari desa Keranji Paidang, lantaran didesa tersebut disediakan hanya satu tempat berobat seperti Polindes atau puskesmas pembantu yang ada di dusun Basa, dan tempat praktek Dokter Umum yang tentunya jika masyarakat miskin berobat ditempat tersebut akan mengeluarkan biaya pribadi untuk membayar biaya perobatan yang ada. Sedangkan masyarakat belum tentu punya biaya yang mencukupi untuk membayar biaya perobatannya.

Masyarakat desa Keranji Paidang peserta Jamkesmas, apabila akan berobat ke Puskesmas cukup hanya melampirkan foto copy KTP, KK, dan kartu Jamkesmas sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan apabila memerlukan penanganan yang lebih atau ingin dirujuk dirumah sakit daerah, masyarakat cukup minta rujukan Puskesmas.

Sejak diberlakukannya program Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sjsn) mulai Januari 2014 maka program Jamkesmas beralih ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan banyak terjadi masalah-masalah dikalangan masyarakat khususnya di Desa Keranji Paidang. Masalah ini timbul karena masih ada masyarakat yang kurang memahami alur pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan, masyarakat juga belum mengetahui manfaat dan tujuan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan. Kekurang pemahaman tersebut antara lain kurangnya sosialisasi pemerintah desa dan pihak penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan kepada masyarakat sehingga banyak menimbulkan beragam persepsi masyarakat terhadap peralihan program Jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs). Padahal untuk peserta yang pemegang kartu Jamkesmas semua telah digratiskan / ditanggung oleh pemerintah biaya untuk berobat.

B. TINJAUAN LITERATUR

1. Pengertian Persepsi

Menurut Walgito (1993:84) mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubung antara individu dengan dunia luar.

Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat respon yaitu indera. Alat indera merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Dari

pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

2. Konsep Masyarakat Miskin

Menurut Suryawati (2005:6), menyebutkan ciri-ciri kelompok masyarakat miskin adalah: Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan, Mempunyai pendidikan yang rendah, Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja), Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan Kurangnya kesempatan untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

Menurut Murbyarto, (1990:159), golongan miskin adalah golongan yang rawan pangan yang berpengaruh negatif terhadap produktifitas kerja dan angka kematian. Kemudian menurut Salim (1984:61),

mendefinisikan golongan miskin adalah mereka yang berpendapatan rendah karena rendahnya produktifitas disebabkan oleh; tidak memiliki asset produksi, dan lemah jasmani dan rohani.

Setelah melihat definisi konsep masyarakat miskin di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang tergolong miskin rata-rata tidak mempunyai produksi sendiri, berpendidikan rendah, modal usaha yang kecil, pengangguran dan lemah jasmani dan rohani, rentan akan penyakit kematian.

3. Konsep Jaminan sosial

Ruang lingkup Jaminan sosial adalah sangat luas antara lain meliputi adanya jaminan pangan, pendidikan, kesehatan, papan, makan siang ditempat kerja, dana untuk rekreasi guna mengobati stres dan masih banyak lagi macam ragamnya yang menjamin kehidupan masyarakat. Program Jaminan Sosial adalah jaminan yang menjadi bagian dari program jaminan ekonomi suatu bangsa, namun demikian program jaminan sosial dapat disimak dari karakteristiknya: 1. Program Jaminan Sosial biasanya ditentukan oleh pihak pemerintahan sebagai penyelenggara negara. 2. Program Jaminan Sosial memberikan kepada perorangan dengan pembayaran tunai sebagai ganti rugi akibat suatu resiko. 3. Pendekatan pelaksanaan program jaminan sosial, yaitu berupa: Pelayanan umum, Bantuan social, dan Asuransi sosial.

Sistem Jaminan Sosial merupakan sistem yang bertujuan menjaga dan meningkatkan taraf kehidupan warga negara dalam menjalani kehidupannya. Hadi Setia Tunggal, SH (2015 :50-51).

4. Pelayanan Kesehatan

Menurut Azwaar (2001:30), pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar kode etik profesi yang telah ditetapkan. Pengertian mutu atau kualitas layanan kesehatan bersifat multi dimensi, yaitu mutu menurut jasa pelayanan kesehatan (pasien dan keluarga), menurut penyelenggara pelayanan kesehatan (pihak institusi dan petugas pemberi layanan kesehatan).

Inti dari konsep pelayanan adalah menunjukkan segala bentuk aktualisasi kegiatan pelayanan yang memuaskan orang-orang yang menerima pelayanan sesuai dengan daya tanggap (*responsiveness*), mumbuhkan adanya jaminan (*assurance*), menunjukkan bukti fisik (*tangible*) yang dapat dilihatnya, menurut empati (*empathy*) dari orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai dengan keandalannya (*reliability*) menjalankan tugas pelayanan yang diberikan secara kosekuen untuk memuaskan yang menerima pelayanan.

5. Konsep Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok yang kurang mampu (*disadvantaged groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial yang bersifat formal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, misalnya tunjangan bagi orang cacat atau miskin, tunjangan pengangguran, dan tunjangan keluarga.

Menurut Edi Suharto (2005:3), secara umum kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhi segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan.

Menurut UU No. 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dalam Adi Fahrudin (2012:9), kesejahteraan sosial adalah merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan untuk setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Keranji Paidang tentang peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn/Bpjs.

Pelayanan pemerintah desa dengan masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan suatu desa, baik itu pelayanan dalam bentuk administrasi di kantor desa maupun dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Seperti halnya dengan informasi yang berkaitan dengan program pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan.

Memberikan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat tentang layanan kesehatan untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs), dari pemerintah Pusat melalui pemerintah desa sangat dibutuhkan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) / Peserta

Jamkesmas karena masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang adanya peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan. apakah peserta Jamkesmas yang dibayarkan oleh pemerintah atau peserta BPJS yang membayar iuran setiap bulannya. Berikut kutipan wawancara dengan kepala desa keranji paidang bapak M.Medi.AJ sebagai berikut :

Kami pemerintah desa sudah memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat yang menjadi peserta Jamkesmas. Tetapi untuk saat ini bentuk sosialisasi yang kami berikan kepada masyarakat tentang adanya peralihan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dengan cara mengadakan rapat dan mendata ulang semua masyarakat yang terdaftar menjadi peserta Jamkesmas yang ada di Desa Keranji Paidang ini dengan cara meminta foto copy KT, KK, dan kartu peserta Jamkesmas. sekaligus memberikan penjelasan kepada tentang Jamkesmas ke JKN/BPJS.(kutipan wawancara dengan informan)

Hasil kutipan wawancara diatas bahwa pemerintah desa keranji paidang sudah memberikan informasi atau sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)

Kesehatan kepada masyarakat, bentuk sosialisasi yang diberikan pemerintah desa keranji paidang kepada masyarakat adalah dengan cara mengadakan rapat, mendata ulang masyarakat yang terdaftar menjadi peserta Jamkesmas serta memberikan penjelasan tentang adanya peralihan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan.

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan kepala desa Keranji Paidang diatas jelas bahwa pemerintah desa Keranji Paidang sudah memberikan informasi atau mensosialisasikan program pemerintah pusat tentang adanya peralihan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan kepada masyarakatnya. Tetapi pada kenyataan yang ada masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dan memahami dengan program pemerintah ini. Bentuk sosialisasi yang diberikan pemerintah desa Keranji Paidang kepada masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) / Peserta Jamkesmas yang ada di desa Keranji Paidang untuk peralihan peserta Jamkesmas ke JKN/BPJS belum jelas karena sampai saat ini masih terdapat masyarakat yang belum tahu tentang pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan, Hal tersebut diungkapkan oleh informan bernama Sukiman sebagai berikut:

Iya memang ada dari pemerintah desa memanggil masyarakat untuk rapat, memberitahu kepada masyarakat tentang adanya peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan, tetapi penjelasan dari pemerintah desa tidak begitu lengkap sehingga kami masih kurang memahami dan tidak tahu tentang bagaimana pelayanan kesehatan Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan. (kutipan wawancara dengan informan)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Keranji Paidang belum melakukan sosialisasi yang lebih jauh tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dengan masyarakatnya hanya sebatas pendataan tetapi tidak ada penjelasan yang lebih rinci tentang program pemerintah pusat ini, sehingga masyarakat belum memahami dan bingung apa itu Jkn/Bpjs Kesehatan dan bagaimana pelayanannya terutama pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan bernama Kasim sebagai berikut :

Memang ada dari pemerintah desa minta foto copy KK, KTP, dan Kartu Jamkesmas, untuk pendataan jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan. Tapi hanya sebatas pendataan, namun tidak ada penjelasan yang lebih dalam lagi bagaimana peralihan pelayanan kesehatan Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan. Sehingga sampai sekarang kami tidak tahu apa itu Jkn/Bpjs, dan gimana bentuk pelayanannya, apakah masih sama atau sudah berubah, karena kalau masyarakat berobat menggunakan kartu jamkesmas ditanggung

pemerintah biaya berobatnya. (kutipan wawancara dengan informan).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat hanya sebatas memberikan informasi tidak menjelaskan secara rinci sehingga menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat tentang adanya peralihan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan kesehatan nasional (Jkn) / Badan penyelenggara jaminan sosial (Bpjs) Kesehatan. seperti hal senada yang diungkapkan oleh bapak Akong sebagai berikut:

Memang ada dari pemerintah desa memberikan sosialisasi tentang adanya peralihan program jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan tetapi bentuk sosialisasi yang diberikan belum begitu lengkap ya harap maklumlah jika kami masyarakat belum mengetahui dengan jelas bagaimana pelayanan program Jkn/Bpjs kesehatan ini kedepannya, ya saya berharap pelayanan yang diberikan Jkn/Bpjs Kesehatan semoga akan lebih baik dari program jamkesmas. (kutipan wawancara dengan informan).

Hasil wawancara di atas bahwa pemerintah desa sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya peralihan program jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan, tetapi bentuk sosialisasi yang diberikan pemerintah desa belum lengkap bagaimana bentuk pelayanan kesehatan Jkn/Bpjs Kesehatan ini kedepannya, dan masyarakat juga berharap kedepannya pelayanan kesehatan yang diberikan program Jkn/Bpjs Kesehatan

akan jauh lebih baik dari pelayanan kesehatan program jamkesmas dirumah sakit.

Sangatlah jelas dari hasil wawancara diatas dari kedua informan masyarakat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang kurang memahami pelayanan kesehatan Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan, karena disebabkan keterbatasan penyampaian informasi pemerintah Desa Keranji Paidang kepada masyarakatnya sehingga masyarakat yang ada di Desa Keranji Paidang khususnya masyarakat yang menjadi peserta Jamkesmas belum tahu dan bingung apa itu Jkn/Bpjs, dan bagaimana bentuk pelaksanaan dan pelayanannya setelah adanya peralihan Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan.

Seharusnya pemerintah desa dalam memberikan informasi atau mensosialisasi tentang peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan kepada masyarakat, harus melibatkan petugas Jkn/Bpjs kesehatan yang lebih tahu alur pelayanan Jkn/Bpjs Kesehatan dan supaya dapat memberikan sosialisasi yang tepat dan akurat tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

mengetahui bagaimana alur pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat ke Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan.

2. Persepsi masyarakat terhadap peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn/Bpjs di desa Keranji Paidang.

Sejak diberlakukannya program Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sjsn) mulai Januari 2014 maka program Jamkesmas beralih kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan, diselenggarakan mulai Per 1 Januari 2014 hingga sekarang berbagai persepsi yang timbul dikalangan masyarakat Indonesia, seperti halnya juga masyarakat yang di Desa Keranji Paidang ada yang menanggapi positif dan ada juga yang negatif. Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan di Desa Keranji Paidang:

Bapak Arin selaku peserta jamkesmas yang beralih ke Jkn/Bpjs Kesehatan berpendapat bahwa :

Program ini sangat bagus karena masyarakat yang kurang mampu seperti kami ini sangat membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan yang memuaskan, dan memadai, dimana sistem pembiayaannya yang subsidi silang. Saya berharap semoga dengan adanya program Jkn/Bpjs ini tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. (kutipan wawancara dengan informan).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Akong yang juga terdaftar menjadi peserta jamkesmas berikut hasil kutipan:

Saya sangat mendukung dan menyambut baik dengan adanya program pemerintah yang baru ini masalah peralihan Jamkesmas ke Jkn/Bpjs, karena dengan adanya program ini masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat menjadi peserta Jamkesmas bisa merasakan atau mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memuaskan. (kutipan wawancara dengan informan).

Sedikit berbeda dengan apa yang ungkapkan Bapak Sukiman, menurutnya program ini sangat bagus tetapi harus disempurnakan lagi terutama dari tahap sosialisasi untuk memperkenalkan peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan kepada masyarakat dan hingga pelayanan yang ada dirumah sakit.

program ini bagus dalam artian pemerintah peduli terhadap kesehatan masyarakat terutama dana untuk biaya kesehatan hanya saja apa yang saya rasakan, yang terjadi dilapangan tidak sama seperti apa yang disosialisasikan, dari itu pemerintah harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan memperbaiki lagi sistem pelayan yang ada dirumah sakit. (kutipan wawancara dengan informan).

Hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa masyarakat di desa Keranji Paidang sangat mendukung dan menyambut baik dengan adanya peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan ini, masyarakat merasa terbantu dan ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memuaskan, tetapi masyarakat juga berharap supaya pemerintah memberikan

sosialisasi yang lebih dalam lagi kepada masyarakat dan memperbaiki pelayanan yang dirumah sakit supaya apa yang disosialisasikan sama dengan dilapangan. Sehingga tidak menimbulkan adanya persepsi masyarakat yang berpendapat negatif terhadap program ini seperti kutipan wawancara dibawah ini :

Bapak Kasim peserta jamkesmas berpendapat bahwa :

Sejak beralihnya program jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan ini, sistem pelayan kesehatan Jkn/Bpjs dirumah sakit sangat tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan kepada kami untuk pelayan kesehatan peserta jamkesmas dirumah sakit. (kutipan wawancara dengan informan).

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal sehingga membuat masyarakat beranggapan tidak baik dengan program Jkn/Bpjs Kesehatan ini, hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Soamin tentang peralihan program jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan berikut kutipan wawancaranya:

Saya kurang menyetujui dengan adanya peralihan program jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan karena saya dapat informasi bahwa Jkn/Bpjs akan membayar iuran, sedangkan Jamkesmas tidak membayar iuran kan dah disubsidikan pemerintah. (kutipan wawancara dengan informan).

Bapak Soamin berpendapat bahwa Jkn/Bpjs kesehatan akan membayar iuran, sedangkan waktu menjadi peserta Jamkesmas digratiskan untuk biaya berobatnya sehingga bapak soamin tidak menyetujui adanya peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs

Kesehatan. masalah yang membuat bapak soamin memberikan pendapat kurang menyetujui peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan ini dikarenakan kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan sehingga masyarakat mempunyai pendapat yang kurang baik tentang program Jkn/Bpjs Kesehatan ini. Tetapi sedikit berbeda dengan pendapat bapak Amian tentang masalah peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan ini, Bapak Amian mengatakan sebagai berikut:

program Jamkesmaslah yang lebih bagus dari Jkn/Bpjs Kesehatan karena program jamkesmas tidak memberikan beban untuk membayar iuran kepada masyarakat karena sudah disubsidikan pemerintah tetapi kalau untuk Jkn/Bpjs Kesehatan masyarakat merasa terbebani karena akan membayar iuran setiap bulannya. (kutipan wawancara dengan informan).

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat beranggapan Jkn/Bpjs kesehatan ini akan membebani masyarakat, sedangkan jamkesmas masyarakat merasa terbantu kerena sistem pembiayaannya sudah disubsidikan pemerintah sehingga masyarakat tidak merasa terbebanni lagi masalah biaya kedepannya.

Setelah dilihat dari hasil wawancara dengan ke enam informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada sebagian masyarakat yang menyetujui dan ada juga kurang menyetujui dengan adanya peralihan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ke

Jaminan kesehatan nasional (Jkn) / Badan penyelenggara jaminan sosial (Bpjs) kesehatan. terjadinya pendapat masyarakat yang berbeda-beda ini di sebabkan sosialisasi yang diberikan pemerintah desa maupun pihak penyelenggara yang kurang tepat dan belum jelas sehingga menimbulkan beragam persepsi dikalangan masyarakat ada yang mendukung dan ada pula yang kurang mendukung dengan adanya program pemerintah tentang jaminan kesehatan nasional (Jkn), yang telah dikelola oleh Badan penyelenggara Jaminan sosial (Bpjs) kesehatan.

3. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) bagi masyarakat.

Menyangkut upaya pelayanan pemerintah Desa Keranji Paidang dengan masyarakat dalam mensoialisasikan program pemerintah pusat kepada masyarakatnya tentang pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sjsn) mulai januari 2014 dimana program Jamkesmas beralih kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat untuk fungsi dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) bagi masyarakat Keranji Paidang.

Karena Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara jaminan Sosial

(Bpjs) Kesehatan memberikan peserta jaminan kesehatan mendapat jaminan kesehatan meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier, baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana sistem pembiayaannya subsidi silang untuk Menjamin kesehatan medis dari administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis seseorang sampai non-medis seperti akomodasi dan ambulan. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non-operatif, kemudian pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan medis.

Pengetahuan masyarakat Desa Keranji Paidang menyangkut penjelasan diatas masalah manfaat dan fungsi Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masih beragam disebabkan keterbatasan sosialisasi dari pihak penyelenggara dan pemerintah desa untuk memberikan informasi masalah program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan sehingga tingkat pengetahuan masyarakat sangat minim terhadap manfaat dan fungsi program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan bagi masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan seorang informan bernama Soamin sebagai berikut :

Kami belum begitu mengetahui dengan jelas untuk manfaat dan fungsi Jkn/Bpjs bagi kami. Karena selama ini jika kami berobat ke puskesmas biasanya pakai kartu Jamkesmas makanya belum paham manfaat dan fungsi Jkn/Bpjs apa kah sama dengan Jamkesmas yang ditanggung pemerintah, jika sudah beralih ke Jkn/Bpjs Kesehatan (kutipan wawancara informan)

Dari hasil kutipan wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa masyarakat di desa Keranji Paidang belum mengetahui dengan jelas terhadap manfaat dan fungsi Jkn/Bpjs bagi masyarakat terutama masyarakat yang menjadi peserta Jamkesmas. Hal senada yang dikatakan oleh informan bernama Amian berikut kutipan wawancara:

Bebicara masalah manfaat dan fungsi Jkn/Bpjs bagi masyarakat. Masih jauh pengetahuan masyarakat disini karena masyarakat terbiasa dengan berobat menggunakan Jamkesmas yang manfaat dan fungsinya sudah diketahui masyarakat, apalagi belum menggunakan pelayanan kesehatan dengan JKN/BPJS ini ya jelas belum tahu manfaat dan fungsinya bagi kami masyarakat. Ditambah lagi sosialisasi dari pemerintah pusat dan desa yang masih sangat kurang. (Kutipan wawancara dengan informan).

Hasil wawancara diatas sangat memperjelas sekali bahwa masyarakat yang ada di Desa Keranji Paidang belum mengetahui manfaat dan fungsi Jkn/Bpjs bagi masyarakat, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara maupun pemerintah desa, ditambah masyarakat sudah terbiasa berobat menggunakan Jamkesmas yang sudah lama diketahui dan digunakan masyarakat. Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Kasim sebagai berikut :

Bagaimana masyarakat disini bisa mengetahui fungsi dan manfaat Jkn/Bpjs kesehatan ini untuk masyarakat sedang kan masyarakat belum semuanya yang sudah menggunakan fasilitas Jkn/Bpjs Kesehatan ini untuk berobat, dan ditambah lagi sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat belum begitu jelas. Yang masyarakat tahu disini cuman jamkesmas dan juga sudah terbiasa menggunakannya dikala berobat. (Kutipan wawancara dengan informan).

Hasil kutipan diatas menerangkan bahwa masyarakat belum mengetahui dengan jelas fungsi dan manfaat Jkn/Bpjs Kesehatan bagi masyarakat di karenakan masyarakat sudah terbiasa menggunakan jamkesmas dan keterbatasan sosialisasi dari pemerintah desa maupun pihak penyelenggara sehingga membuat pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap fungsi dan manfaat jkn/bpjs kesehatan bagi masyarakat khususny didesa keranji paidang.

4. Faktor pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan

Setiap program tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, baik yang berasal dari dalam organisasi (internal) maupun yang berasal dari luar organisasi (eksternal). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang memenuhi kriteria maka ditemukanlah faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan. Faktor pendukung dan Penghambat tersebut.

5. Faktor Pendukung

Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan merupakan salah satu program gagasan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam hal kesehatan. Kesuksesan program ini tidak akan diraih tanpa adanya dukungan-dukungan baik itu dari Pemerintah, masyarakat, lingkungan dan berbagai hal yang berkaitan dengan program ini. Seperti halnya juga dengan adanya peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan, Faktor pendukung dalam Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ameng kepala Puskesmas Pahauman sebagai berikut :

Faktor pendukung tentu saja yang paling pertama ya berasal dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah dan dukungan dari instansi- instansi pemerintah lainnya untuk mengenal lebih jauh mengenai Jkn, mendukung dan menyuksekkannya sehingga mereka mengadakan seminar-seminar tentang adanya pelaksanaan peralihan program jamkesmas ke Jkn dengan mengundang Bpjs Kesehatan sebagai narasumber untuk mengenalkan lebih jauh kepada masyarakat. (Kutipan wawancara dengan informan).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan peran pemerintah pusat maupun daerah dan dukungan dari instansi-instansi lainnya merupakan hal yang sangat penting dalam proses upaya mengenalkan peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan kepada masyarakat, Mengadakan seminar tentang adanya Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dengan mengundang nara Sumber dari Petugas Jkn/Bpjs Kesehatan Agar masyarakat bisa lebih memahami tentang penggunaan, dan Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Isak, selain dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah, harus ada dukungan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota, Kantor Imigrasi, Dinas Kesehatan, asosiasi-asosiasi kesehatan lainnya dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mendukung dan mensukseskan program Jkn/Bpjs Kesehatan ini. pentingnya informasi sehingga mereka berinisiatif mengundang Bpjs Kesehatan dalam melaksanakan sosialisasi baik bagi peserta jamkesmas maupun yang telah

menjadi peserta Bpjs Kesehatan dan menyediakan aula untuk sosialisasi, laptop, LCD, alat transportasi dan lain sebagainya untuk mendukung Bpjs Kesehatan dalam mensosialisasikan program Jkn ini. Jika tidak ada dukungan dalam memberikan kesempatan bagi Bpjs Kesehatan maka tentu informasi mengenai program ini bisa saja hanya sebatas aturan pemerintah yang akhirnya tidak terealisasi maksud dan tujuan program. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Isak pegawai Jkn/Bpjs Kesehatan yang ada di Kecamatan Sengah Temila.

Dukungan dari instansi-instansi terkait sangat diperlukan dalam mendukung kami memberikan sosialisasi tentang program Jkn kepada masyarakat, dan tentu juga adanya dukungan partisipasi masyarakat yang aktif dan berinisiatif dengan mengundang kami melakukan sosialisasi di daerah mereka, tentunya kami juga didukung oleh sarana dan prasarana, baik itu kelengkapan untuk sosialisasi, hingga alat transportasi (Kutipan wawancara dengan informan).

Hasil wawancara dengan kedua informan diatas menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan adalah dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah serta instansi-instansi lainnya dan dukungan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung dan mensukseskan program yang diselenggarakan oleh pemerintah.

6. Faktor Penghambat

Jika ada faktor pendukung tentu ada juga faktor penghambat. Layaknya seperti program lainnya, Faktor penghambat dalam pelaksanaannya peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs Kesehatan, hambatan ini berkaitan dengan pelaksanaan dilapangan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Isak sebagai berikut:

Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn)/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan karena masih kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat di tambah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat, Mungkin karena mereka masih sehat. Setelah mereka sakit mereka baru kembali dan menyalahkan kami bahwa mereka tidak tahu kalau prosedurnya seperti itu. (Kutipan wawancara dengan informan).

Sementara menurut Bapak Ameng, hambatan yang paling sering dihadapi itu berkaitan dengan komplain peserta. Masih banyak keluhan dari peserta khususnya peserta eks Jamkesmas yang belum memahami perubahan dari program jaminan kesehatan Nasional dengan program baru dari Bpjs Kesehatan sebagai berikut:

Hambatan yang sering saya temui dilapangan ketika memberikan pelayanan dipuskesmas adalah adanya masyarakat yang selalu membanding-bandingkan program jaminan kesehatan yang dulu dengan yang sekarang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bpjs Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes. Selain itu, Bpjs Kesehatan juga memiliki peserta lama yang dulunya di Jamkesmas. Sehingga, bagi peserta lama, selalu saja ada keluhan mengenai perbedaan pelayanan yang diperoleh. Komplain juga banyak muncul

berkaitan dengan apa yang mereka dapatkan dalam sosialisasi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Padahal, itu bisa jadi bukan kesalahan dari BPJS melainkan dari pihak lain yang terkadang memberikan informasi yang kurang benar, ditambah lagi kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini” (Kutipan wawancara dengan informan).

Hasil wawancara dengan kedua informan diatas disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan, disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga mengakibatkan masih terdapat masyarakat yang kurang memahami Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dilapangan, kurangnya Partisipasi masyarakat sehingga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan sehingga banyaknya keluhan dan komplain dari masyarakat tentang pelayanan dilapangan.

D. KESIMPULAN

Bentuk upaya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa Keranji Paidang tentang peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan masih kurang dalam memberikan informasi atau sosialisasinya yang tidak tepat sehingga membuat sebagian masyarakat bingung dan tidak tahu dengan adanya peralihan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan.

Persepsi masyarakat terhadap peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn/Bpjs di desa Keranji Paidang, bahwa ada sebagian masyarakat yang menyetujui dan ada juga kurang menyetujui dengan adanya peralihan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan kesehatan nasional (Jkn) / Badan penyelenggara jaminan sosial (Bpjs) kesehatan. terjadinya pendapat masyarakat yang berbeda-beda ini di sebabkan sosialisasi yang diberikan pemerintah desa maupun pihak penyelenggara yang kurang tepat dan belum jelas sehingga menimbulkan beragam persepsi dikalangan masyarakat ada yang mendukung dan ada pula yang kurang mendukung dengan adanya program pemerintah tentang jaminan kesehatan nasional (Jkn), yang telah dikelola oleh Badan

penyelenggara Jaminan sosial (Bpjs) kesehatan.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) bagi masyarakat. Masih kurang karena disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa yang menimbulkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs), sehingga masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas manfaat dan fungsi Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan bagi masyarakat yang ada di desa keranji paidang.

Faktor pendukung dan hambatan didalam pelaksanaan peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn/Bpjs yang ada di desa Keranji Paidang.

1. Faktor pendukung, peran pemerintah pusat maupun daerah dan dukungan dari instansi-instansi lainnya merupakan hal yang sangat penting dalam proses upaya mengenalkan peralihan program Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan kepada masyarakat, dan dukungan masyarakat sangat berperan penting dengan adanya Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Agar masyarakat bisa lebih memahami tentang penggunaan, dan Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan.

2. Faktor penghambat, bahwa hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan, disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga mengakibatkan masih terdapat masyarakat yang kurang memahami Pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dilapangan, kurangnya Partisipasi masyarakat sehingga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan sehingga banyaknya keluhan dan komplain dari masyarakat tentang pelayanan dilapangan.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa Keranji Paidang tentang peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn/Bpjs kesehatan harus memberikan informasi atau sosialisasinya yang jelas dan tepat sehingga membuat masyarakat dapat mengetahui dengan adanya peralihan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan.
2. Masyarakat harus mendukung dan menyetujui dengan adanya peralihan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan kesehatan nasional (Jkn) / Badan penyelenggara jaminan sosial (Bpjs) kesehatan. program pemerintah tentang jaminan kesehatan nasional (Jkn), yang telah dikelola oleh Badan penyelenggara Jaminan sosial (Bpjs) kesehatan.
3. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) bagi masyarakat. Masyarakat harus proaktif dalam mencari informasi tentang fungsi dan manfaat Jkn/Bpjs Kesehatan bagi

masyarakat, jangan biasakan menunggu informasi dari Pemerintah Desa supaya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) lebih dalam, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas manfaat dan fungsi Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) kesehatan bagi masyarakat yang ada di desa keranji paidang.

4. Faktor pendukung dan hambatan didalam pelaksanaan peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn/Bpjs yang ada di desa Keranji Paidang. Pemerintah pusat, daerah harus saling bahu-membahu dengan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn / Bpjs, biar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan peralihan program nasional Jamkesmas ke Jkn / Bpjs. karena semuanya harus saling mendukung satu sama lain.

F. REFERENSI

1. Sumber Buku

Azwaar, S. 2001 *menjaga mutu pelayanan kesehatan*. Yayasan Penerbit IDI. Jakarta.

.....1998. *Metode Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Hadi Setia Tunggal. 2015. *Memahami Sistem Jaminan Sosial (SJSN) Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia*. Jakarta : harvarindo

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadjakarya.

..... 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadjakarya.

..... 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadjakarya.

Masyhuri dan Zainudin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Nawawi, Hadiri. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Pers.

Siti Chotimah Lubis, 2008. *Persepsi Pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Haji Medan*. Skripsi. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan.
Sumber :
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14955>

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Adminitratif*. Bandung : Alfabet.

..... 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Malang : Bumi Aksara.

Suryawati, 2005. *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. JMPK Vol. 08/No.03/September/2005.

Parasuraman, A. Valerie, 2001. (diterjemakan oleh Sutanto) *Delovering Quality Service*. The Free Press, New York.

Walgito, Bimo. 1993. *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*. Yokyakarta: ANDI OFFSET

2. Dokumen Pemerintah :

DepKes RI.2008 .Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dokumen Kantor Desa Keranji Paidang 2015 tentang keadaan demografi dan georafis desa. di ijinkan unutk dikutip.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Keputusan Menteri Kesehatan No. SK No. 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Internet :

<http://jkn.depkes.go.id>. Diakses pada tanggal, 05-agustus-2014.

www.sehatnegeriku.com Diakses pada tanggal, 14-Oktober-2014

www.promkes.depkes.go.id Diakses pada tanggal, 14-Oktober-2014

www.ppjk.depkes.go.id Diakses pada tanggal, 14-Oktober-2014



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ARMANSYAH
 NIM / Periode lulus : 11110022 /
 Tanggal Lulus : 29 JAN 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi
 E-mail address/ HP : Armansyah12.naif@yahoo.co.id / 0896 9368 0230

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa SOCIOLAX (*) pada Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PERALIHAN PROGRAM NASIONAL JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYALINGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI DESA KEKAMPANGAN KECAMATAN SENGAH PEMILU KABUPATEN LANDAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal

Antonisa Jusap Abao, S.Sos, M.Si
 NIP. 198105102005012017

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 02-04-2016

ARMANSYAH
 NIM. 11110022

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)